#### **BAB II**

#### LANDASAN TEORI

#### A. Home Industry

#### 1. Pengertian Home Industry

Home Industry adalah rumah usaha produk atau barang dan jasa, atau juga disebut perusahaan kecil karena jenis kegiatanya dipusatkan di rumah. Pengertian lain home industry yang biasa dikenal sebagai industri rumah tangga merupakan usaha yang tidak berbentuk badan hukum dan dilaksanakan oleh seseorang atau beberapa orang anggota rumah tangga yang mempunyai tenaga kerja empat atau kurang, dengan kegiatan mengubah bahan dasar menjadi bahan jadi atau setengah jadi, dengan tujuan untuk dijual. Jadi bisa disimpulkan bahwa home industry merupakan kegiatan produksi atau usaha kecil yang dioperasikan di rumah dengan tujuan merubah bahan dasar menjadi bahan jadi untuk dijual.

#### 2. Jenis-jenis Industri

Macam-macam industri berdasarkan tempat bahan baku yaitu:

- a. Industri Ekstaktif, merupakan industri yang memanfaatkan bahan baku langsung dari alam sekitar. Contoh: hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan lain-lain.
- Industri Nonekstaktif, adalah industri yang memanfaatkan bahan baku langsung dari tempat lain selain alam sekitar.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Moh. Nasrudin, dan Moh. Nur Khaqiqi, *Kompilasi Karya Ilmiah UKM-F Dycres 2019* (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2020), 128.

- c. Industri Fasilatif, merupakan industri yang mana hasil produksinya berupa jasa yang dijual langsung ke konsumen. Contoh: perbankan, asuransi, eskpedisi, transportasi dan lainnya.
  - Pengelompokan jenis industri merujuk klasifikasi surat keputusan menteri perindustrian No.19/M/I/1986 sebagai berikut:
- a. Industri Kimia Dasar, adalah industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku dasar untuk diolah menjadi bahan kebutuhan seharihari.
- b. Industri Mesin dan Logam Dasar, merupakan industri yang mengubah bahan mentah menjadi bahan baku atau barang setengah jadi.
- Industri Kecil, merupakan industri yang membutuhkan modal dan tenaga kerja relative kecil.
- d. Aneka Industri, merupakan industri yang menyediakan beragam kebutuhan konsumen.<sup>16</sup>

## 3. Peran Home Industry

Peran *home industry* dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pembangunan sektor industri secara adil guna menggerakan ekonomi nasional yang harus dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia, terutama pada kelompok ekonomi lemah atau mereka dengan penghasilan dibawah tingkat rata-rata pendapatan per kapita nasional. Tujuan utama dari pembangunan dengan berbagai cara untuk mewujudkan tatanan ekonomi yang berpatok pada kepentingan rakyat dan keadilan sosial, kesejahteraan

.

 $<sup>^{16}</sup>$  Victorianus,  $Hukum\ Pendirian\ Usaha\ dan\ Perizinan\ (Yogyakarta:\ CV.\ Budi\ Utama,\ 2015),\ 5.$ 

dan kemakmuran seluruh rakyat, bukan kepentingan individu, golongan atau kelompok tertentu dengan proses produksi yang bisa melibatkan semua masyarakat disekitarnya. Seperti menyerap tenaga kerja, menumbuhkan keterampilan, dan meningkatkan pendapatan kelaurga. <sup>17</sup> Dengan penjabaran sebagai berikut:

#### a. Menyerap tenaga kerja

Penyerapan tenaga kerja dapat diukur dari banyaknya lapangan kerja yang terisi, yang tercermin dari jumlah penduduk yang bekerja. Terserapnya penduduk yang bekerja disebabkan karena permintaan akan tenaga kerja yang menjadikan kesempatan kerja yang dapat ditampung untuk bekerja di suatu unit perusahaan. Dalam ilmu ekonomi kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup dalam proses produksi.

#### b. Menumbuhkan keterampilan

Keterampilan adalah kemampuan untuk mengaplikasikan pemikiran, ide, dan kreativitas secara efektif dalam melakukan, mengubah, atau menciptakan sesuatu sehingga memberikan nilai tambah pada hasil pekerjaannya.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Victorianus, *Hukum Pendirian Usaha dan Perizinan* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2015), 7.

#### c. Meningkatkan pendapatan keluarga

Pendapatan keluarga adalah imbalan yang diterima oleh anggota keluarga sebagai penghargaan atas kontribusi yang mereka berikan dalam proses produksi. 18

### B. Kesejahteraan

## 1. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan dapat diartikan secara luas. Menurut BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional), kesejahteraan keluarga tercapai ketika keluarga telah mampu memenuhi kebutuhannya yang mana ada 12 poin penting yaitu dari sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, tabungan, interaksi dalam keluarga, interaksi dalam masyarakat, informasi, peran dalam masyarakat, dan yang terpenting agama. Palam KBBI kesejahteraan merujuk pada kondisi yang sejahtera, mencakup keamanan, keselamatan, dan ketentraman. Kesejahteraan juga bisa diartikan sebagai tingkat kualitas hidup yang bisa makmur pada tingkat individu, kelompok, atau masyarakat secara meluas. Jadi Kesejahteraan dapat berfungsi sebagai alat penilaian untuk mengukur tingkat kesetaraan sosial dalam suatu masyarakat. Serta kesejahteraan melibatkan pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan kesehatan, serta

-

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Ridwan Efendi, "Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sembilan Sektor Ekonomi di Sumatra Selatan", *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi*, Vol. 8, No. 1 (2014), 31.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Firman Nugroho, Mereka yang Keluar (Bandung, LEKKAS: 2018), 28.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 1382.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Markhamah, Cita Raras Nindiya, dkk, *Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal* (Surakarta: Muhamadiyah University Press, 2021), 8.

kebutuhan yang lebih tinggi seperti pendidikan, hubungan sosial, keamanan, dan peluang untuk pengembangan diri.

#### 2. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan

### 1. Tingkat penghasilan

Tingkat penghasilan yang tinggi memungkinkan individu dan keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, serta kebutuhan lainnya seperti pendidikan dan kesehatan.

#### 2. Tingkat pendidikan

Akses ke pendidikan yang baik membuka peluang kerja yang lebih baik dan meningkatkan potensi penghasilan. Pendidikan juga meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, yang berdampak positif pada kesejahteraan individu.

#### 3. Tingkat kesehatan

Akses yang mudah ke layanan kesehatan membantu mencegah dan mengobati penyakit, serta mendukung kesehatan mental dan fisik. Praktik hidup sehat, seperti pola makan yang seimbang, olahraga, dan pemeriksaan kesehatan rutin, membantu mempertahankan kesehatan yang baik dan mengurangi biaya medis, sehingga meningkatkan kesejahteraan.

#### 4. Pengeluaran rumah tangga

Pengelolaan pengeluaran rumah tangga yang efektif memastikan bahwa pendapatan dapat mencukupi kebutuhan dasar dan kebutuhan lainnya, serta memungkinkan tabungan dan investasi untuk masa depan.

#### 5. Kondisi rumah.

Kondisi rumah yang aman, nyaman, dan layak huni berperan penting dalam kesejahteraan fisik dan mental penghuni. Kondisi perumahan yang baik melindungi dari cuaca ekstrem dan risiko kesehatan lingkungan. <sup>22</sup>

#### 3. Indikator-indikator Kesejahteraan

Menurut BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) mengenai tahapannya yaitu:

- Keluarga Pra Sejahtera, yaitu keluarga yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasar secara memadai, termasuk kebutuhan pangan, pakaian, perumahan, kesehatan, dan pendidikan.
- Tahapan Keluarga Sejahtera 1, yaitu keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya tetapi masih belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan dari segi sosial dan kebutuhan lainnya.
  - a. Pada umumnya dalam satu keluarga tersebut makan dua kali atau lebih.
  - Anggota keluarga memiliki pakaian sendiri-sendiri dan berbeda untuk di rumah dan untuk keluar.
  - Rumah yang di tempati mempunyai atap, dinding dan lantai yang bagus.
  - d. Bila anggota keluarga ada yang sakit bisa dibawa ke dokter atau pukesmas.

<sup>22</sup> Anton A.P. Sinaga, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat di Kota Medan", *Jurnal Ilmiah Methonomi*, No 1, Vol. 2, (Januari-Juni 2016), 4.

- e. Bila pasangan usia subur dan ingin ber KB bisa dibawa ke sarana pelayanan kontrasepsi.
- f. Semua anak umur 7-15 dalam keluarga bersekolah.
- 3. Tahapan Keluarga Sejahtera II, yaitu keluarga yang sudah mampu memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan sosial-psikologis, namun belum mampu menabung.
  - a. Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan kegiatan ibadah sesuai dengan keyakinannya sendiri-sendiri.
  - Paling kurang dalam waktu satu minggu seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telur.
  - Seluruh anggota keluarga mendapatkan paling sedikit satu pasang pakain baru dalam satu tahun.
  - d. Luas lantai rumah paling kurang 8 meter persegi untuk setiap penghuni rumah.
  - e. Dalam waktu tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugasnya masing-masing.
  - f. Ada seseorang atau lebih dari anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan.
  - g. Seluruh anggota keluarga umur 10-60 tahun bisa membaca tulisan latin.
  - h. Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat atau obat kontrasepsi.
- 4. Tahapan Keluarga Sejahtera III, yaitu keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan mulai kebutuhan dasar, sosial, dan

perkembangannya, tapi belum mampu memberikan sumbangan untuk orang lain.

- a. Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama.
- b. Sebagian penghasilan ditabung dalam bentuk uang maupun barang.
- Kebiasaan makan bersama keluarga paling kurang satu minggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi.
- d. Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat tempat tinggal.
- e. Keluarga melaksanakan kagiatan rekreasi bersama.
- f. Keluarga memperoleh berita dari surat kabar, televisi, Koran atau radio.
- 5. Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus, yaitu Keluarga telah mampu memenuhi semua kebutuhannya, termasuk kebutuhan dasar, sosial, perkembangan, dan dapat memberikan sumbangan yang signifikan kepada masyarakat secara berkelanjutan.
  - Keluarga sudah teratur dengan sukarela memberikan sumbangan materil untuk kegiatan sosial.
  - b. Ada anggota yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/ instansi masyarakat.<sup>23</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Ahmad Syaekhu, *Penyuluhan KB dan Pembangunan Keluarga Sejahtera* (Makasar: Penerbit Kesuma Jaya, 2018), 16-18.

# C. Maqashid Syariah

### 1. Pengertian Maqashid Syariah

Dari sisi etimologi, istilah *Maqasid Syariah* berasal dari bahasa arab yang mana ada dua kata, yakni Maqasid dan Syari'ah. Maqasid adalah bentuk jamak dari kata "Maqshud" yang merujuk pada kesengajaan atau juga tujuan. Sedangkan "Syari'ah" menggambarkan jalan menuju air yang mengalir kearah kebaikan.

Adapun dari sisi terminology definisi dari *Maqashid Syariah* yang beberapa dijelaskan oleh para tokoh yaitu Imam Al Ghazali. Menurut beliau *maqashid syariah* merujuk pada upaya dasar untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan, dan mendorong tercapainya kesejahteraan.<sup>24</sup> Sedangkan menurut Ibnu Qayyim Al- Jauziyah *maqashid syariah* adalah hikmah dan kemaslahatan bagi segenap manusia di dunia dan Akhirat. Hal demikian, bisa diketahui dari kemaslahatan yang terletak pada keadilan, rahmat, kesejahteraan, dan hikmah. Bilamana keadilan telah berubah menjadi aniaya, rahmat berubah menjadi kekerasan, kemaslahatan berubah menjadi kerusakan, dan hikmah menjadi sia-sia, maka hal seperti ini tidak ada kaitannya dengan syariah Islam.<sup>25</sup>

# 2. Tingkatan Maqashid Syariah

Menurut Al-Syathibi dan dipertegas oleh Al-Ghazali dalam kitabnya al-mustashfa maqasid syari'ah memiliki tiga tingkatan, yakni dharuriyah,

\_

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perpektif Maqashid Al-Syari'ah* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018), 41

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Riyan Nuryadin, *Teologi untuk Pendidikan Islam* (Yogyakarta: K-Media, 2015), 211.

hajiyah, dan tahsiniyah. Maqasid dharuriyah sendiri mengacu pada hal-hal yang harus ada dan ditegakkan untuk menjaga kemaslahatan agama dan dunia. Kegagalan dalam memenuhi dan melaksanakan maqasid dharuriyah dapat mengakibatkan ketidakmampuan mencapai kemaslahatan dunia bahkan berpotensi menimbulkan kerusakan dan kekacauan.<sup>26</sup>

Imam Al-Ghazali mengemukakan dalam maqasid daruriyah terdapat lima hal pokok yaitu :<sup>27</sup>

# a. Hifdzu Ad-diin (Menjaga Agama)

Hak untuk beribadah dan mematuhi perintah-perintah agama, mencakup pelaksanaan rukun Islam dan aspek-aspek lain dari ibadah yang diatur oleh agama.

# b. Hifdzu An-nafs (Menjaga Jiwa)

Mengarah pada pembentukan nilai-nilai kehidupan dengan kualitas yang baik, baik pada tingkat individu maupun dalam konteks sosial masyarakat yang lebih luas.

# c. Hifdzu Al-aql (Menjaga Akal)

Pentingnya menghormati akal tidak hanya terbatas pada menjaga kapasitas kognitif agar terhindar dari gangguan jiwa atau kehilangan kesadaran.

#### d. Hifdzu An-nasl (Menjaga Keturunan)

Dalam menjaga keturunan tidak sekedar tentang menjaga reputasi pribadi dan keluarga dari fitnah orang lain. Konservasi tradisi dan budaya

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Ibid 213.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Ahmad Syakur, *Dasar-Dasar Pemikiran Ekonomi Islam* (Kediri: STAIN Kediri Press, 2011), 5.

juga memegang peranan penting dalam menjaga kehormatan dan status sosial masyarakat secara keseluruhan.

## e. Hifdzu Al-mal (Menjaga Harta)

Hal ini melibatkan lebih dari sekadar menjaga harta yang kita hindarkan dari gangguan orang lain. Yaitu hak dari individu guna memperoleh harta secara halal melalui pekerjaan dan transaksi juga menjadi bagian dari aspek ini.<sup>28</sup>

# 3. Kedudukan Maqashid Syariah

Said Ramadhan al-Buthi mempertegas bahwa maslahat itu bukanlah dalil yang berdiri sendiri sebagaimana dalam Al-Quran, Ijma, Qiyas, dan Hadis. Namun, maslahat yaitu kaidah umum yang termasuk simpulan dari sekumpulan hukum dari sumber dalil syari.

Maslahat yaitu kaidah umum yang disyarikan dari banyaknya persoalan furu' yang berasal pada dalil hukum. Artinya hukum fikih pada persoalan-persoalan furu' dapat dilakukan analisis dan ditarik simpulan bahwa seluruhnya mempunyai satu titik kesamaan yakni memberikan pemenuhan atau perlindungan maslahat hamba di dunia ataupun akhirat.<sup>29</sup>

Dipenuhinya hajat hamba merupakan kaidah umum sementara hukum furu' dari asal dalil-dalil syariah yaitu furu'. Maka dari itu, maslahat harus bersandar pada dalil, baik qiyas, Al-Qur'an, Hadis, maupun Ijma atau minimal tidak adanya yang menentang. Mashlahat tidak dapat menjadi dalil

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Ivan Rahmat Santoso, "Konsep Marketing Berbasis Maqoshid Al-syari'I Imam Al-Ghazali", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, No. 03, Vol. 05, (2019), 160.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Oni sahroni, *Maqashid Bisnis Dan Keuangan Islam*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2015) 41.

yang berdiri sendiri dan sandaran hukum tafshili, namun legalitasnya harus diperkuat oleh dalil syari.

Pada dasarnya kesejahteraan dapat diukur melalui beragam indikator yang bervariasi tergantung pada sudut pandang yang digunakan. Secara umum *Maqashid Syariah* sendiri adalah tujuan tujuan syariat dan rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum-Nya, dimana tujuan untuk kebaikan atau kemashlahatan umat manusia dengan mencangkup segala hal dalam kehidupan manusia termasuk rezeki, kebutuhan dasar hidup, kualitas emosional, intelektual, dan pemahaman seperti unsur prinsip-prinsip dasar yang ada.